B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Orde baru adalah orde yang memiliki tatanan idiil setia kepada pancasila dan UUD 1945, serta mempunyai tekad yang kuat untuk membangun dalam rangka mengisi kemerdekaan. Tatanan idiil orde baru juga tidak menghendaki berlanjutnya pertentangan idiologi. Orde baru berorientasi pada program bukan pada politik. (Ridwan Saidi, 1993, 6).

Struktur politik baru ini ditandai dengan langkah-langkah baru yang diambil oleh pemerintah orde baru. Diikutkannya Golkar sebagai peserta pemilu pertama orde baru. Pada tahun 1971 menjadi sepuluh, yaitu: PNI, IPKI, PARKINDO, partai Katolik, Murba, Golkar, Parmusi, PSII, NU, dan Perti.

Sebenarnya, Golkar sebagai peserta termuda sudah cukup puas kalau harus menduduki posisi ketiga di bawah partai politik-politik yang lain. Namun hasilnya di luar dugaan Golkar mendapatkan sukses besar dengan memperoleh suara 62 persen dari seluruh jumlah pemilih.

Kemenangan Golkar yang gemilang ini karena adanya beberapa keuntungan yang dimiliki, suasana politis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Psikologis masyarakat Indonesia pada tahun-tahun pertama setelah tumbangnya orde lama mengharapkan perubahan hampir disegala bidang. Didorong oleh rasa kuatnya propaganda politik pada awal tahun 1970-an yang meluas di masyarakat, bahwa rakyat Indonesia harus bersedia mengganti perjuangan politik yang berorientasi pada program yang semakin memberikan angin segar bagi kemenangan Golkar. (Afan Gaffar, 1993, xii). Selain itu, dukungan ABRI dan birokrasi berperan tidak kecil dalam memenangkan Golkar dalam pemilu 1971 (Ridwan Saidi, 1993, 8). Dengan keuntungan yang dikantongi itu, maka golkar mampu memproyeksikan dirinya sebagai organisasi peserta pemilu alternatif.

Langkah lain yang diambil orde baru adalah penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik ini didahului dengan penyederhanaan fraksi-fraksi di DPR pasca pemilu 1971. Penyederhanaan fraksi ini kemudian diikuti dengan pelangsingan kepartaian, yaitu dari sembilan partai menjadi dua partai, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia). PPP adalah merupakan wadah dari fusi dari NU, Parmusi, PSII dan Perti sedangkan PDI adalah hasil dari fusi PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun Golkar menyatakan dirinya bukan sebagai partai politik, karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan penyampingan pembangunan atau karya. Oleh karena itu, untuk menderetkan ketiganya diperkenalkan terminologi baru yaitu organisasi sosial politik. (Orsospol). (Ridwan Saidi, 1993 ,11).

Walaupun mengalami penaikan dan penurunan pada pemilu-pemilu berikutnya (pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987 dan pemilu 1992). Namun Golkar tetap memimpin dengan suara mayoritas. Kemenangan berturut-turut dan mayoritas ini memang tak bisa dipungkiri bahwa itu karena adanya campur tangan ABRI dan rekayasa politik yang agak canggih dari pemerintah dengan segala kekuasaannya. Dukungan dari birokrasi (pemerintah) mengakibatkan dana yang dimiliki oleh Golkar jauh melampaui yang dimiliki partai-partai politik lain (PPP dan PDI), sehingga Golkar mampu membuat kejutan-kejutan, sementara partai lain harus puas dengan dana yang pas-pasan untuk menggelembungkan dirinya.

Dukungan pemerintah yang begitu besar kepada Golkar menjadikan kekuasaan Golkar seolah-olah identik dengan kekuasaan pemerintah. Di kecamatan yang pemilunya tidak berhasil memenangkan Golkar dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menderita kesusahan, seperti listrik sulit masuk ke kecamatan itu, begitu sebaliknya.

Dengan ditambah adanya kebijaksanaan "Floating Mass" (massa mengambang), seakan-akan semakin memantapkan kedudukan Golkar sebagai pimpinan dalam perolehan suara mayoritas. Kebijaksanaan "Floating Mass" yaitu para pemilih selalu mengambang, yang hanya diperbolehkan untuk mengekspresikan pilihan politiknya di dalam pemilu yang diselenggarakan sekali dalam setiap lima tahun. Di antara dua pemilu yang berjalan lima tahun itu, rakyat harus mengkosentrasikan pikiran atau tenaga bukan pada urusan politik tetapi pada pembangunan ekonomi (Afan Gaffar, at. al, xiii). Adanya tiga faktor itulah (dukungan ABRI, birokrasi, dan kebijaksanaan floating mass) yang menjadi pendukung utama kemenangan Golkar, walau itu bisa dikatakan kemenangan yang kurang bersih.

Konsekwensi logis dari adanya dukungan ABRI, birokrasi dan kebijaksanaan floating mass adalah partai-partai lain, secara otomatis mengalami kemunduran. PPP dan PDI semakin tidak berdaya untuk bersaing dengan Golkar. Kedua partai tersebut seakan hanya sebagai pelengkap peserta pemilu. Yang ini bagi adanya demokrasi terasa ganjil, kurang jujur dan tidak adil. Ini berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampakkan demokrasi yang kurang baik.

Sementara dari konvensi-konvensi para khalifah dan bahkan dari perbuatan-perbuatan Rasulullah sendiri, kita dapat mengalami aturan bahwa wakil rakyat adalah orang-orang yang memperoleh kepercayaan massa. Mereka harus memiliki kejujuran, kemampuan, serta kesetiaan dalam tingkatan yang tak dapat ditandingi di mata masyarakat dan yang berperan serta dalam keputusan-keputusan utama. Negara menjamin kenyataan bahwa kerja sama rakyat yang terbuka dan suka rela akan diabadikan bagi negara dalam penerapan keputusan-keputusan yang diambilnya. (Abul A'la Al Maududi 1993 , 263). Ini berarti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi demokrasi dan melarang adanya praktek-praktek kotor yang dapat menjatuhkan nama baik demokrasi.

Allah menjadikan manusia sebagai kholifah di bumi agar manusia itu memelihara dan menciptakan kemakmuran masyarakat, juga beribadah kepada-Nya agar manusia memperoleh derajat yang tinggi disisi-Nya yaitu derajat taqwa.

Untuk menciptakan masyarakat tersebut banyak kendalanya. Hal ini disebabkan karena adanya benturan-benturan kepentingan. Oleh karena itu perlu adanya wakil-wakil dalam memecahkan masalah tersebut. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia sebagai khalifah maka tugas hidupnya adalah melaksanakan dan menegakkan perintah dari pemegang kedaulatan. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (Al Qur'an, 2, 30).

Al Qur'an sebagai pedoman hidup Islam bersifat umum, yaitu meliputi segala aspek. Ini berarti dalam masalah politik pun umat Islam sebagai penduduk mayoritas bangsa Indonesia tidak boleh membuat peraturan dan kebijaksanaan yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: Partai sebagai saran komonikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik (of political socialisation), partai politik sebagai sarana recruitment politik (political recruitment), partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflik managemant). (Mariam Budiarjo, 1993, 160-164).

Dari pengamatan sepintas, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah organisasi sosial politik di Indonesia, kita perlu meninjau lebih lanjut bagaimana orsolpol pada masa orde

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru di Indonesia penelitian atau riset ini penting mengingat bahwa kita adalah umat Islam yang selalu terikat oleh hukum Islam dan harus menjalankan dengan sebaik-baiknya. Selalin itu, penelitian ini juga penting mengingat masih miskinnya khazanah pustaka di negara kita mengenai hal ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah yang ingin dibahas dan diteliti adalah fungsi organisasi sosial politik di Indonesia pada masa orde baru ditinjau dari segi hukum Islam. Ini karena secara sepintas nampaknya masih ada hal-hal yang tak senafas dengan hukum Islam dalam masalah siyasah.

C. Batasan Masalah

Masalah di atas nampaknya masih terlalu luas dan membutuhkan batasan. Untuk itu, agar lebih jelas dan terarah dalam penganalisaannya dan pembahasannya perlu dibatasi dari segi:

- Subyeknya : Masyarakat Bangsa Indonesia
- Obyeknya : Partai Persatuan pembanguanan (PPP)
  Golongan Karya (Golkar).
  Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Waktunya : Sejak pemilu 1 tahun 1971 sampai pemilu V tahun 1992 pada masa orde baru.
- Tempatnya : Seluruh wilayah Indonesia.

D. Perumusan Masalah

Setelah kita memahami latar belakang, identifikasi dan batasan masalahnya, maka perlu dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi organisasi sosial politik di Indonesia pada masa orde baru?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi organisasi sosial politik pada masa orde baru di Indonesia tersebut?

E. Tinjauan Studi

Selaras dengan perumusan masalah yang berupa pertanyaan itu, maka tujuan studi ini adalah:

1. Menguraikan kedudukan dan peran organisasi sosial politik pada masa orde baru di Indonesia serta upaya-upayanya dalam menghadapai pemilu.
2. Untuk membahas dan mengetahui apakah fungsi organisasi sosial politik yang telah berjalan selama ini di Indonesia telah sesuai dengan hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau menyimpang.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi diharapkan memiliki manfaat sekurang-kurangnya untuk beberapa hal di bawah ini:

1. Dijadikan bahan pijakan bagi riset berikutnya yang lebih mendalam.
2. Menambah wawasan mengenai kedudukan dan fungsi organisi sosial politik di Indonesia.
3. Memberikan kontribusi pemikiran dalam masalah politik untuk penyempurnaan sistem politik di Indonesia agar lebih baik lagi.

G. Data Yang Dihimpun

Data-data yang perlu kami himpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Upaya-upaya orsospol dalam menghadapi pamilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987 serta pemilu tahun 1992.
- Hasil-hasil perolehan suara dari pemilu-pemilu tersebut.
- Kendala-kendala yang dihadapi oleh orsospol.
- Fungsi-fungsi orsospol dalam perpolitikan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Sumber-Sumber data

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari:

1. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan pustaka yang langsung berkaitan dengan ketiga organisasi sosial politik (PPP, Golkar, dan PDI) juga mengenai perundang-undangannya.
2. Sumber data skunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan dari sumber utama serta bahan-bahan pustaka yang masih ada kaitan relevansinya.

I. Teknik penggalian data

Dari sumber-sumber yang digunakan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitan masalah tersebut merupakan riset pustaka, adapun tehnik penggalian data yang kami gunakan adalah dengan cara menelaah dan menganalisa sumber data yang ada. Kemudian dari telaah dan analisa itu hasilnya dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

J. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisa dengan beberapa tahapan yaitu:

1. Pengolahan data dengan editing yakni memeriksa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali data-data yang sudah dikumpulkan tersebut.

2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mengistimasikan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penemuan hasil ialah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil-dalil untuk memperoleh simpulan-simpulan.

K. Metode Pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan beberapa metode:

1. Metode Induktif ialah cara penyajiannya dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. Metode Deduktif yaitu cara penyajian dimulai dari teori-teori, dalil-dalil, generalisasi-generalisasi, dan selanjutnya dikemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhirnya ditarik simpulan yang bersifat umum.
3. Metode Komperatif ialah membandingkan antara ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang mengatur masalah partai politik dan Golkar dengan aturan hukum Islam yang selanjudnya dirumuskan simpulannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id